

“NEK KANANE” ALTERNATIF PENDEKATAN PEMBERDAYAAN BERBASIS PARTISIPATIF

Muhamad Abdul Roziq Asrori¹, Yepi Sedy Purwananti¹, Rikie Kartadie¹

¹ STKIP PGRI Tulungagung
roziq@stkipgrigitulungagung.ac.id

ABSTRAK

Pendampingan ini bertujuan membantu relawan BKM meningkatkan mutu organisasi dan mengembangkan asset pemberdayaan menjadi lebih terarah serta asset yang ada bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan melalui model pemberdayaan berbasis persepsi dan partisipasi masyarakat local. Metode yang digunakan adalah pertama: melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan BKM dan pemerintah desa untuk menyatukan mental dan visi pemberdayaan. Kedua proses pelatihan dengan mengusung dua pelatihan dasar yakni manajemen mutu organisasi dan pengembangan ekonomi kreatif untuk kelangsungan asset dana yang ada. Ketiga adalah melakukan sosialisasi, penguatan dan pembinaan pemberdayaan. Keempat membuat system informasi dan juga web BKM. Hasil angket kepuasan menunjukkan kepuasan dengan prosentase 49% dan 53%. Pengembangan pelatihan menghasilkan system baru pengembangan asset BKM melalui kambing gulir dan gruduk masal pada KSM penunggak. Budaya partisipasi dan mutu organisasi dikembangkan pendekatan “nek kanane” sebagai bagian dari kearifan local masyarakat. Jaringan komunikasi dan akses masyarakat difasilitasi dengan system informasi BKM-KOTAKU.

Kata kunci: *BKM-KOTAKU, Partisipatif, Manajemen Organisasi, PNPM-MP, Nek Kanane, Kearifan Lokal*

1. PENDAHULUAN

Terbitnya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa secara tidak langsung telah merubah pola pemberdayaan yang ada di perdesaan, terutama berkaitan dengan penerimaan bantuan pendanaan atau masyarakat sering menyebutnya dengan istilah “BLM” Bantuan Langsung Masyarakat karena difokuskan ke pihak pemerintah kembali. PNPM-MP yang bermutasi menjadi Program KOTAKU menjadi salah satu program yang terdampak dengan undang-undang tersebut, sebab selain berakhirnya kontrak pendanaan sejak tahun 2016, saat ini ada BUMDES yang merupakan program sejenis dengan program ekonomi salah satu program tridaya di PNPM-Mandiri Perkotaan. Meskipun asset ekonomi bergulir yang dikelola UPK BKM saat ini masih berjalan dan hampir rata-rata setiap desa lebih dari 300 juta. Bahkan rumor yang beredar di masyarakat asset tridaya PNPM-MP akan dimargirkan dengan BUMDES. Sehingga menimbulkan kegalauan pada PKBKM selaku pelaksana system organisasi yang ada di PNPM-MP ini, termasuk juga berimbas pada banyaknya kredit macet pinjaman KSM karena mempersepsi PNPM-MP telah berakhir sehingga tidak perlu mengembalikan dana pinjaman. Tentunya persoalan tersebut memerlukan penanganan untuk mengembalikan persepsi masyarakat agar kembali berpartisipasi pada pemberdayaan masyarakat

terutama untuk membangun daerah di mana mereka berada.

Memberdayakan masyarakat memerlukan sentuhan partisipasi masyarakat secara langsung. Pembangunan partisipatif harus tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005). Karena memang secara kultur masyarakat desa dan kota sangat berbeda sehingga memerlukan perlakuan yang tidak sama, bahkan antar desa juga. (Adisasmito, 2013, Rahayu, 2010, Soemantri, 2010). Termasuk dalam mengembangkan masyarakat melalui program KOTAKU yang saat ini membutuhkan kerelawanan dan swadaya masyarakat yang konsisten.

Cara pandang yang beragam dari masyarakat mengenai pelaksanaan program pemberdayaan, membuat pelaksanaan program sulit untuk diukur keberhasilannya. Perlu kesadaran kolektif untuk membangkitkan kesadaran bergotongroyong masyarakat agar bisa memenuhi kepentingan masyarakat bersama. Persoalan tersebut perlu mengkaji pendekatan pemberdayaan yang bisa efektif sebagai masukan positif untuk progresifitas pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif. Sehingga organisasi PKBKM tetap berjalan dengan baik dan asset PNPM-MP tetap bisa berkembang untuk kesejahteraan masyarakat.

Konsep pemberdayaan yang baik tentu tidak menjadikan masyarakat sebagai objek proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri (Brown, 1995, Sairin, 2002, Sumodiningrat, 1999)., yang tentu berimbas pada; Pertama, berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketiga, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Keempat, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat. Kelima, meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

Winarni (1998) memberikan rambu-rambu dalam pemberdayaan harus melakukan tahapan yang benar yakni diawali dengan penyadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan, selanjutnya bisa dilakukan penguatan kapasitas masyarakat, dan yang terakhir adalah pendayaan. Oleh Siswanto (2016) diperjelas lagi harus mengurangi konflik terselubung dalam masyarakat dan memudahkan akses pengelolaan pemberdayaan. Pemikiran tersebut menguatkan pendahulunya Chambers (1996), yang menjelaskan paradigme pembangunan harus mengarah pada *people centered, partisipatory, empowering, and sustainable*.

Untuk menciptakan efektifitas pemberdayaan, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap unsure-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan pemberdayaan, yang oleh Darwanto (dalam Santoso: 2016) disebutkan dengan “inklusi dan partisipasi”. indikator yang bisa digunakan a) siapa yang diberdayakan, b) bagaimana mereka diberdayakan, c) peran apa yang dimainkan, d) bagaimana ruang partisipasinya. Selanjutnya “akses dan informasi”. Proses pemberdayaan memerlukan aliran informasi yang tidak boleh tersumbat dari berbagai lini antar masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Hal ini bisa memudahkan untuk para pemangku kepentingan terlebih masyarakat guna mendapatkan berbagai peluang meningkatkan taraf hidup, seperti informasi berkaitan pendidikan, program-program pelatihan, hak dan kewajiban, dan juga peluang pasar yang sesuai dan lainnya. Unsur “kapasitas organisasi lokal” juga menjadi

penting. Untuk mendapatkan penguatan dan respon yang baik harus ada kemampuan untuk mengorganisir potensi lokal, karena dari mereka ini keberlanjutan program bisa diandalkan. Unsur lain yang penting yakni “Profesionalitas” pelaku pemberdaya. Kemampuan para relawan dalam memahami, mendengarkan, mendemonstrasi, melakukan tindakan, dan bertanggungjawab atas kebijakan yang ada menjadi penentu ketepatan perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan pada sasaran pemberdayaan.

2. METODE

Metode yang yang digunakan adalah pertama: melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan BKM dan pemerintah desa terkait dengan model pemberdayaan berbasis swadaya dan partisipasi masyarakat untuk menyatukan mental dan visi pemberdayaan. Kedua proses pelatihan dengan mengusung dua pelatihan dasar yakni manajemen mutu organisasi dan pengembangan ekonomi kreatif untuk kelangsungan asset dana yang ada. Ketiga adalah melakukan pembinaan pemberdayaan dan sosialisasi pada warga tentang model pemberdayaan yang dilakukan, bersama BKM dan Perangkat menyusun perencanaan pembangunan dengan sasaran hasil kesepakatan secara musyawarah oleh masyarakat, mengevaluasi program sekaligus mencari solusi untuk pengembangan program berikutnya. Keempat membuatkan web sebagai media publikasi, informasi, dan transparansi keseluruhan kegiatan pemberdayaan di masing-masing BKM

3. PEMBAHASAN

Tahapan awal pemberdayaan mendapatkan respon yang baik oleh kedua belah mitra, bahkan diwujudkan dalam kesepakatan MoU kerjasama pada kedua belah pihak untuk saling bersinergi dalam proses pemberdayaan. Terlebih dalam hal pemanfaatan teknologi informasi sebagai pengembangan pemenuhan akses informasi pada masyarakat.



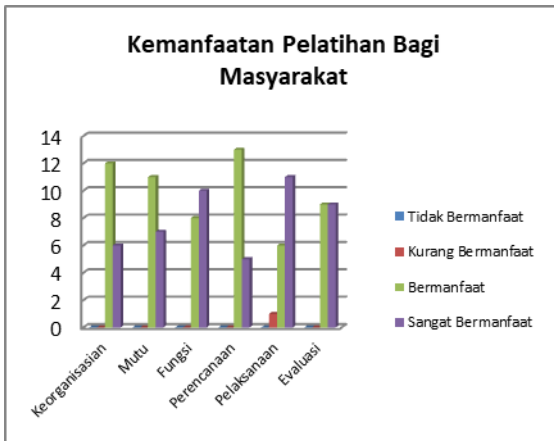
Gambar 1. Inovasi pembuatan perencanaan social menggunakan permainan KOKUPOLY



Gambar 2. Penguatan Kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan KSM

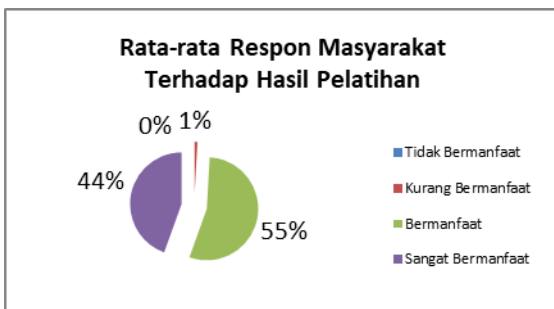
Hasil pelatihan menunjukkan kepuasan dari warga yang dipilih sebagai responden dengan tingkat kepuasan 49% pada pendampingan mutu organisasi dan perencanaan program dan 53% pada pengembangan asset dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Berikut data informasi berkaitan kepuasan pendampingan pasca pelatihan pada mitra BKM Wahana Sejahtera disajikan dalam bentuk *bar chart* berikut:



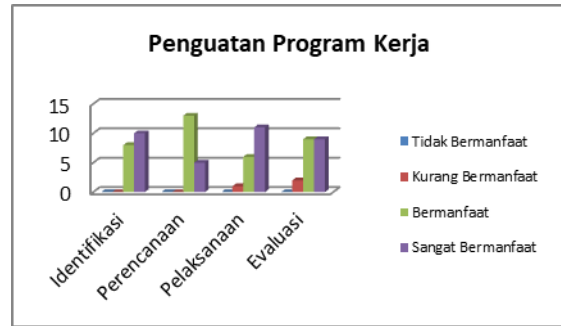
Gambar 3 Rincian Kemanfaatan Pelatihan Pemahaman berorganisasi

Rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pendampingan bisa dilihat pada *pie chart* berikut:



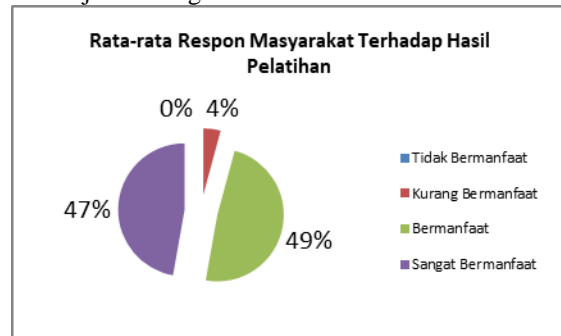
Gambar 4 Persentase Kemanfaatan Pelatihan Mutu Organisasi dan Perencanaan Program

Untuk meningkatkan mutu organisasi dan kinerja yang baik dilakukan pendampingan dengan mengusung pelatihan penguatan program kerja prioritas unggulan. Hasil bisa disajikan dalam *bar chart* berikut:



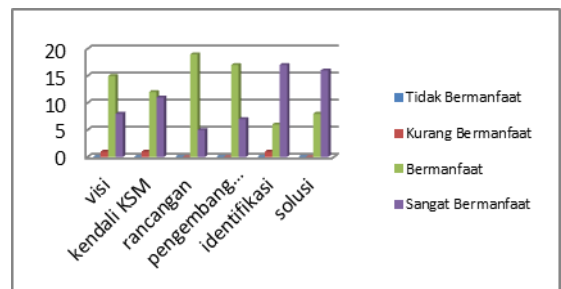
Gambar 5. Rincian Kemanfaatan Pelatihan penguatan program kerja

Rata rata kepuasan dari pendampingan ini menunjukkan angka berikut:



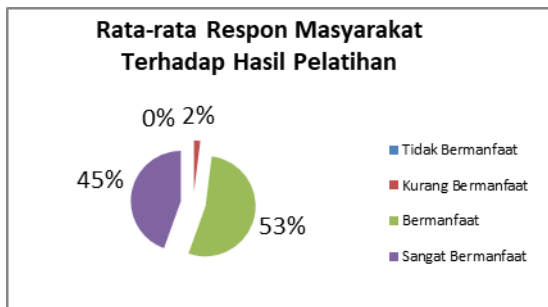
Gambar 6. Persentase Kemanfaatan Pelatihan penguatan Program kerja

Berikut data informasi berkaitan kepuasan pendampingan pasca pelatihan pada mitra BKM Makmur Sejahtera disajikan dalam bentuk *grafik bar chart* berikut:



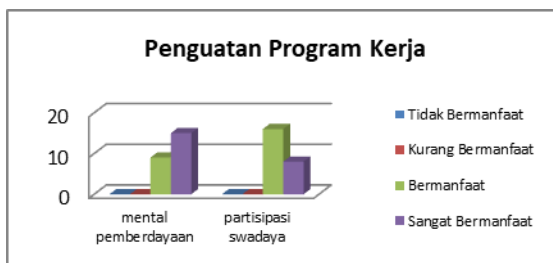
Gambar 7 Kemanfaatan Pelatihan Pemahaman Pengembangan Asset

Sementara tingkat rata-rata kepuasan dimasing-masing item bisa dilihat dari *pie chart* berikut:

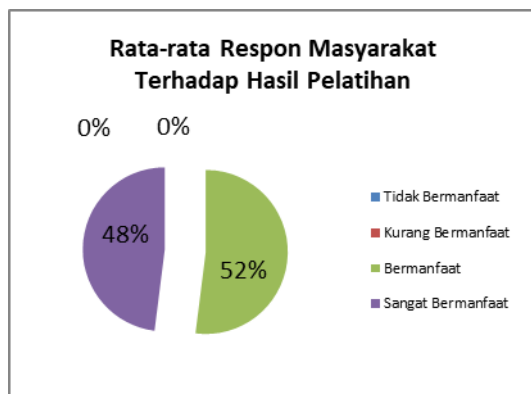


Gambar 8 Persentase Kemanfaatan Pelatihan pengembangan Asset

Untuk penguatan kinerja organisasi dalam menangani partisipasi masyarakat disajikan bentuk *bar chart* berikut.



Gambar 9. Rincian Kemanfaatan Pelatihan penguatan program kerja



Gambar 10 Persentase Kemanfaatan Pelatihan penguatan Partisipasi

Program PNPM-MP nampaknya merupakan program yang bagi pengelolanya sendiri (BKM) merupakan sebuah program yang sangat berat (terbatasan oleh aturan yang sangat ketat) karena harus menuntut kerelawanan yang tinggi sebab tidak ada honor yang melekat di dalamnya. Bahkan seringkali untuk pengelola tidak hanya mengeluarkan swadaya tenaga dan pikiran sebagai bentuk partisipasi, akan tetapi swadaya keuangan harus selalu terlihat sebagai pemodelan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya, baik tenaga, pikiran, maupun keuangan.

Sesungguhnya dalam pemberdayaan dengan prinsip partisipatif pastinya menuntut pelibatan

secara penuh oleh semua pihak, karena menuntut kesukarelawan. Suryono (dalam Siswanto 2012) menjelaskan dalam paradigma pembangunan manusia perlu menitik beratkan pada pelayanan sosial, pembelajaran sosial, pemberdayaan, kemampuan, dan juga kelembagaannya. Dalam hal ini para relawan yang tergabung dalam PKBKM pastinya sangat memahami betul tentang seluk beluk dari masyarakat sebagai subjek pemberdayaan. Konsep relawan mengarah pada kesediaan untuk memberi bantuan secara sukarela. Tuntutan kerelawanan yang ada pada Program KOTAKU hasil mutasi dari PNPM-MP sangat tinggi sehingga BKM dan juga KSM sangat memerlukan dukungan yang serius dari lembaga terkait terutama pemerintah desa untuk bersinergi dalam segala halnya.

Para publik figur yang ada di desa sebisa mungkin menjadi teladan bagi masyarakat sebagai proses pembelajaran sosial. Davis (1977) memperjelas argumen tersebut dengan memastikan bahwasannya jika kita ingin berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat maka harus betul-betul melibatkan emosional dan mentalnya untuk mendorong kelompok guna mencapai tujuan dan tanggungjawab mereka.

Anggota BKM dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak pemberdayaan di masyarakat sangat tergantung pada persepsi yang mereka bangun. Keterlibatan mereka dalam berpartisipasi secara emosional dan mental memberikan penjernihan dalam mengaktualisasikan persepsi. Partisipasi yang telah diimplementasikan dengan baik di seluruh rangkaian kegiatan di PNPM-Mandiri Perkotaan membawa pada tergugahnya kembali nilai gotong-royong masyarakat.

Menurut pandangan Weber keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung pada kesesuaian target dan alat untuk mencapainya. Gambaran para relawan dengan konsep dan pemahaman yang baik terhadap pemberdayaan partisipatif dan proses pencapaian tujuan pemberdayaan, membawa pada kemudahan dan kelancaran para pelaksana pemberdaya untuk menggerakkan potensi masyarakat local menuju pada keberdayaan. wujud partisipasi swadaya baik materiil maupun imateriil yang terpola dengan baik mendorong terbentuknya kembali nilai gotong royong dalam masyarakat. Dengan terbangunnya kembali nilai gotong-royong dalam perspektif teori aksi bisa menjadi orientasi dan tujuan masyarakat dalam berinteraksi social (Ritzer, 2005).

"*Nek Kanane*" bisa menjadi alternative pendekatan pemberdayaan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai gotong royong masyarakat meskipun belum lazim digunakan. "*Nek Kanane*" merujuk pada sebuah sikap dan perilaku tanpa

pamrih didasari jiwa ikhlas. Sehingga yang diharapkan tidak lain adalah balasan kelak di Akhirat. Dalam masyarakat religious seperti di Tulungagung, pendekatan ini sangat cocok diterapkan, mengingat dalam pandangan religi kehidupan akhirat adalah tujuan akhir dalam kehidupan. Sementara di dunia ini adalah tempat mencari bekal untuk menuju kesana. dengan begitu menjadikan pelaku pemberdayaan bisa memiliki sikap amanah dan kesadaran partisipatif. Tindakan ini menurut Weber disebut sebagai “*wertrational*” dalam konsep *the degree of rationality* yakni tindakan social dengan motif nilai-nilai yang tertanam dalam diri individu dan masyarakat.

Kesediaan sikap dan Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi swadaya tenaga dan dana menggambarkan persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan sangat positif dan dapat meningkatkan mutu pemberdayaan yang ada. Gordon W. Alport menjelaskan mengenai konsep partisipasi sebagai berikut. “*the person who participace is ego involved instead of merely task invilved*” (Sastropoetro, 1988). Sementara Edi Suharto sangat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan karena menurutnya: “Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri karena tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan mereka sendiri. Tingkat kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan pemberdayaan juga melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif” (Suharto 2014:8). Sehingga dalam partisipasi Sastropoetro (1988) menjelaskan unsur penting yang harus dilakukan, *pertama*, perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran. *Kedua*, kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan. *Ketiga*, kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. *Keempat*, adanya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan bersama.

Mengingat mulai banyaknya anggota PKBKM yang mengalami kegalauan terhadap keberlanjutan program PNPM-MP yang telah bermutasi menjadi Program KOTAKU, maka penguatan Kapasitas Masyarakat dan juga mutu organisasi PKBKM perlu ditingkatkan dan hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pembinaan atau pun pencerahan kembali tentunya dengan membangun persepsi “*Nek Kanane*”.

Peningkatan kapasitas masyarakat dengan pendanaan dari pemerintah yang mengharuskan adanya relawan swadaya baik tenaga maupun dana

perlu dikelola dengan amanah dan ikhlas. Persepsi positif “*Nek Kanane*” memiliki peranan yang penting terhadap kesuksesan pemberdayaan, sebab memberikan pengetahuan, meningkatkan pemahaman, dan juga memupuk sikap untuk sadar akan pentingnya memberdayakan potensi diri dan masyarakat sekitar, meskipun terkadang dirasakan berat tetapi pastinya menggugah kesadaran bergotong-royong. Kesadaran dan mental baik tersebut memberikan sinyal positif terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas pemberdayaan, selain itu juga membangun kearifan local masyarakat dalam pemberdayaan bercirikan “*Nek Kanane*”.

4. KESIMPULAN

Keputusan pemerintah menghentikan aliran pendanaan pemberdayaan PNPM-Mandiri Perkotaan menyisakan berbagai persoalan di tingkat bawah yakni Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai relawan yang harus terus menjaga kelangsungan asset yang dimiliki. BKM mengalami kegelisahan dan penurunan semangat keorganisasian sementara di sisi lain KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) pemanfaatan langsung dana pemberdayaan menjadi kurang terkontrol.

Mengingat keberhasilan pemberdayaan selama ini yang telah diraih, asset pemberdayaan berupa SDM, dana, dan bangunan yang ada rasanya menjadi sangat rugi dan memprihatinkan kalau tidak dikelola kembali dengan baik, sebab mampu memberikan banyak kemanfaatan bagi masyarakat desa terutama peningkatan perekonomian warga dengan ekonomi kreatifnya.

Pendampingan ini telah menghasilkan system baru pada pengembangan asset BKM dengan memvalidasi usulan KSM secara riil dan melakukan gruduk masal pada KSM penunggak, selain itu guna mendukung kegiatan sosial difasilitasi dengan program kambing gulir. Selain itu untuk membangun budaya partisipasi dan mutu organisasi dikembangkan pendekatan “*nek kanane*” sebagai bagian dari kearifan local masyarakat. Demi memperluas jaringan komunikasi dan akses masyarakat dibangun system informasi BKM-KOTAKU sekaligus berfungsi sebagai pelaporan keuangan dan kegiatan BKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada DRPM Dikti yang telah mendanai pengabdian ini untuk tahun anggaran 2018. Selain itu diucapkan juga terimakasih kepada kedua mitra yakni BKM Wahana Sejahtera desa Pulotondo dan BKM

Makmur Sejahtera yang turut berpartisipasi aktif dalam pengabdian ini.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Brown, Donald. 1995. "Poverty-Growth Dichotomy". Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press
- Rahayu, Budiana. 2010. *Pembangunan Perekonomian Nasional melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Semarang: MG
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2005. *Modern Sociological Theory*. Jakarta: Prenada Media
- Sairin, Sjafri. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sastropetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: Alumni
- Siswanto, Budi. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Servaminora
- Soemantri, Bambang Trisantoso. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Soemodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suharto. Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Winarni.1998. *Orientasi pembangunan masyarakat desa menyongsong abad 21, menuju pemberdayaan pelayanan masyarakat*.Yogyakarta: Adiliya Media